



PROGRESS REPORT

QUICK WINS ISU SEPEKAN

PUSAT PENELITIAN

AGUSTUS 2022

TAHAPAN PELAKSANAAN



Pembenahan
Mekanisme Kerja



Peningkatan Cakupan
dan Substansi



Peningkatan Kualitas
Tampihan



Uji Coba dan
Diseminasi

Pembenahan Mekanisme Kerja





SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SOP/PP//SETJEN DPR RI/...../2022
TGL. PEMBUATAN	... Oktober 2022
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	-
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Penelitian, <u>Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.</u> NIP. 19720511199903 1 003
NAMA SOP	SOP ISU SEPEKAN
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 .	1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI; 2. Memahami Penyusunan TOR Isu Sepekan; 3. Memahami Penyusunan Isu Sepekan 4. Memahami Proses Editing Isu Sepekan 5. Memahami Proses Penyimpanan dan Pendistribusian Isu Sepekan.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
-	1. Nota dinas/lambar disposisi. 2. Media Sosial WA Korbid 3. Komputer/ Laptop data base Jaringan internet.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan.	Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

PEMBENAHAN MEKANISME KERJA

Mula Mula		Keterangan
Angkapan	Waktu	
ambar disposisi (Korbid)	5 menit	Disposisi 1. Isu Sepekan diperuntukan bagi Ketua DPR, Pimpinan AKD, dan seluruh Anggota DPR RI. 2. Isu Sepekan merupakan isu aktual yang sedang dan telah dibahas di Komisi dalam satu pekan dan/atau terdapat dalam surat kabar dan/atau majalah yang terbit pada seminggu berjalan dan/atau atas perintah kapuslit
lwal isu sepekan	2 menit	Distribusi Isu Sepekan sesuai standar pelayanan 1. Tiap-tiap bidang pada Pusat menyusun jadwal tugas pembuatan Isu Sepekan 2. Standar penyusunan isu sepekan dibuat sebagai standar pelayanan

Keterangan	
Output	1. Isu Sepekan disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan 2. Prinsip Isu Sepekan aktual, informatif, dan analitis
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word
Output	Isu sepekan dalam bentuk file word

DRAFT SOP

Jadwal Penerbitan:

1x/minggu saat masa sidang
Tiap hari Jumat

3. Menerima Isu Sepekan dalam bentuk file pdf dan mendistribusikan kepada seluruh Sekretariat Komisi



Keterangan	
Output	1. Media Komunikasi Isu Sepekan berbasis digital 2. Isu Sepekan didistribusikan kepada Pimpinan DPR, Pimpinan AKD lainnya, Anggota DPR berdasarkan kebutuhan

PENINGKATAN
CAKUPAN DAN
SUBSTANSI

Step 1

Telah disusun format dan *template* baru bagi penulis

Step 2

Telah ditingkatkan jumlah artikel tiap kali terbit → 11 Komisi

Step 3

Telah disebarluaskan melalui Sekretariat AKD, website Puslit dan Medsos Puslit

TEMPLATE BAGI PENULIS DAN EDITOR

Edisi	Minggu ke.. Bulan... 2022 (tanggal... s.d. ...) Contoh: Minggu ke 1 Bulan Februari 2022 (tanggal 28 Januari s.d. 3 Februari)
Komisi	Ditulis dengan Nama Komisi yang terkait dengan Isu Sepekan ini Contoh: Komisi V
Penulis	Nama Lengkap: Jabatan/Bidang: Peneliti Muda/Polhukam Email:@dpr.go.id
Editor	Ditulis dengan nama lengkap editor
Judul	Judul artikel ditulis dengan huruf kapital
Isu/ Permasalahan	Diisi dengan isu atau permasalahan yang bersifat aktual. Ditulis secara sederhana, informatif dan analitis (jumlah kata antara 350 s.d 600 kata).
Atensi DPR	Diisi dengan langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh DPR RI (sebutkan AKD dan Komisi terkait) dalam menindaklanjuti isu atau permasalahan yang terjadi. Dapat ditambahkan fungsi DPR (legislasi, pengawasan, dan anggaran) yang sesuai (jumlah kata antara 100 s.d 150 kata).
Sumber Referensi **)	Sumber berita ditulis lebih ringkas, hanya berisi media dan tanggal terbit. Contoh: Media Indonesia, 31 Januari 2021; Kompas, 31 Januari, 2 dan 3 Februari 2022, tempo.co, 4 Februari 2022. RDPU Komisi V tanggal 7 Februari 2022.
Abstrak/ ringkasan untuk ditampilkan di sosmed (Instagram Puslit)	Berisi saripati/ringkasan isi tulisan untuk ditayangkan di Instagram Puslit (jumlah kata antara 100 s.d 130).

*) **Judul File** yang dikirimkan penulis ke editor dan kemudian dari editor ke *layouter* dan tim *website*, dan kemudian menjadi pdf setelah di-*setting* di *canva* adalah sbb:

IS Bidang Komisi/Bulan Minggu Tahun

Contoh: IS Kesra IX/ Feb2 2022
IS Ekkuin V/ Feb3 2022
IS Polhukam II/ Juni1 2022



) **Sumber Referensi bisa berasal dari RDP di komisi terkait, atau dari media cetak maupun media *online* yang kredibel antara lain:

<u>Media cetak:</u>	<u>Media online:</u>
1. Kompas	1. kompas.com
2. Media Indonesia	2. bisnis.indonesia.com
3. The Jakarta Post	3. media.indonesia.com
4. Bisnis Indonesia	4. tempo.co
5. Republika	5. cnbc.com
	6. cnn.com
	7. detik.com
	8. antaranews.com
	9. jakartapost.com



**PENINGKATAN
KUALITAS TAMPILAN**

ISU Sepekan

BIDANG EKONOMI DAN KEBUJUKAN PUBLIK
Minggu ke-4, Bulan November 2021 (Minggu ke-4 s.d. 25 November)

SERAPAN BELANJA APBD 2021 RENDAH

Rafika Sari
Peneliti Madya/Kebijakan Ekonomi
rafika.sari@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Belanja daerah (APBD) dipergunakan dalam rangka pendanaan pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data per 31 Oktober 2021, penyerapan rendah. Kondisi ini ditunjukkan oleh: (a) persentase realisasi belanja triwulan pada anggaran; (b) rata-rata serapan belanja daerah hanya 17,4% di Provinsi DI Yogyakarta di atas 68%; (c) surplus pendapatan 25,2% (Rp111,2 triliun); dan (d) serapan belanja pendidikan dan kesehatan sebesar Rp233 triliun (17,4% dari pagu), dan kesehatan sel

Nilai serapan belanja rendah menunjukkan ketidakaktifan untuk pemeliharaan ekonomi nasional (PKN). Daerah dinilai menahan belanja sebesar Rp540 triliun guna alokasi PEN. Di masa pandemi, belanja da lebih masyarakat dan menstimulus sektor swasta yang berkontraksi.

Faktor penyebab rendahnya belanja daerah dapat dipetakan antara menyesuaikan dinamika kebijakan pemerintah pusat dan kondisi di pendopatan daerah menurun akibat pandemi dan (a) kewahatiran APBD.

Langkah antisipasi yang dapat dilakukan mencakup: (a) penyisipan tagihan; (b) peningkatan transparansi nilai serapan anggaran kepada daerah.

FUNGSI DPR

Kemisi II dan XI DPR RI berperan penting untuk melakukan pengendalian penyerapan anggaran APBD tahun 2021 guna pemeliharaan juga perlu mendorong pemerintah pusat untuk menyiapkan regulasi kasus ini tidak berulang.

ATENSI DPR

Kemisi II dan XI perlu mendorong dan memastikan (a) pemerintah mem serapan APBD nya rendah; (b) hambatan dalam penyerapan belanja serapan belanja daerah tepat sasaran dan hanya diputarukan bagi ke

SUMBER

Kompas, 24 November 2021; Media Indonesia, 24 November 2021; N

ISU Sepekan

BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
Minggu ke-4, 26 November 2021 (Minggu ke-4 s.d. 25 November)

BANGKITNYA ISIS/ISIL DI AFGHANISTAN DAN PERLUYA MENINGKATKAN KEWAJIBAN ATAS ANCAMAN TERORISME DI TANAH

Pollak Parliaga, Koordinator
Peneliti Utama/Hubungan Internasional dan Strategik,
pollakp@yahoo.com

ISU ATAU PERMASALAHAN

Sejak kembali dan dimulainya pemerintahan Taliban, kelompok teroris kembali muncul di timur tengah melalui kontrol pemerintah baru Taliban atas seluruh wilayah di perbatasan timur AS, telah mendorong pemimpin ISK di kawasan ini di tengah kesulitan ekonomi dan krisis pangan ya Afghanistan menjadi negeri yang rawan mendebarkan kembali dan kembali ke ISK.

Program kemitraan Karat, terutama AS, telah membuat krisis ekonomi dan sosial. Adik-ikad operasi mereka dapat menghidupkan Timur Jauh Asia. Khususnya Indonesia, negara Islam terbesar akan ketahanan politik yang tinggi. ISK/ISIL dapat memanfaatkan di Indonesia melalui operasi sengketa sengketa yang sudah ter

Terdapat ISK/ISIL (Badan Militer Pengorganisasian Terorisme) dan kegiatan terorisme jemaah haji/umrah (J) yang ada (IS/ISIL), ter bahaya ancaman kebangkitan kelompok-kelompok terorisme belum berakhir dan pemerintah sedang rapat mengatasinya. JI di Jawa dan lain-lain belakangan ini, bahkan Papua, yang ju

FUNGSI DPR

Ingkahan kawasan telah meredakan ISK No. 2/2018 mengenai Adik I No.15/2018, yang telah mengatur secara lebih pembebasan terorisme mulai dari pencegahan, pemberantasan hingga upaya pemangku kepentingan, baik aparat, pemerintah maupun masyarakat beraktifitas hingga masalah. UU ini tidak hanya memi prosedur, dan fasilitasi keamanan kelompok teroris, tapi perlindungan kepada masyarakat dan negara, serta tindakan yang tidak menjadi target penangkapan.

Pengawasan DPR melalui Komisi I yang topiknya fokus pada masalah ke perlu mengatur secara rutin rapat-rapat dengan aparat negara TNI, untuk memastikan perkembangan ancaman yang sedang di terdapat yang terkait dengan perkembangan ancaman, program dan pusat-pusat perhatian anti-terorisme dan deradikalisasi mengatasi masalah yang mereka hadapi agar segera dapat setiap ancaman yang datang.

ATENSI DPR

Kerja sama antar-aparat anti-terorisme dengan negara-negara kawasan di belahan negara anggota ASEAN, yang selama ini sebagai basis utama/utama di kawasan Timur Jauh. Kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNCTAD untuk masalah ke dengan strategi baru yang telah dibuat para kelompok teroris

SUMBER

Kompas, 17 November 2021; Media Indonesia, 17 November

ISU Sepekan

BIDANG KEBAJAHTERAAN SOSIAL
Minggu ke-4, 26 November 2021 (Minggu ke-4 s.d. 25 November)

PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PADA MASA PANDEMI

Admad Muchlisin, Faltah
Peneliti Agama dan Tradisi Keagamaan
Admad.faltah@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Jemaah umrah Indonesia mulai Oktober 2021 atau awal tahun 2022 akan kembali di Wilson Saudi Arabia. Pemerintah Arab Saudi membuat kembali dibataskan karena Covid-19. Pemerintah kembali pelaksanaan ibadah umrah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh jemaah. Im Pakdean, Arab, Turki, Azerbaijan, Iran, Afrika Selatan, dan lainnya per negara lain, sebelum terbang ke Arab Saudi.

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga hanya mengizinkan jemaah yang lengkap. Adapun jenis-jenis yang dibataskan Pemerintah Arab Saudi, ya Johnan K Johnson, jemaah yang sudah mendapat visa awal tidak lengkap akan tidak mendapat bimbingan atau bantuan untuk dapat berangkat kembali dan di

Sekalarnya, pemerintah menertibkan Keputusan Menteri Agama RI Penyelenggaraan Perjalanan Jemaah Umrah pada Masa Pandemi Covid-umrah yang sebagai berikut.

(1) **Persyaratan jemaah yang meliputi:** a) usia sesuai ketentuan jemaah mamili syarat kesehatan atau kemandiri (wajib memiliki dokumen persyaratan fisik akan menaruh pihak lain akan risiko yang timbul di (diutamakan dengan uji hasil PCR/SWAB tes yang dibalanced sama beraktifitas kembali dan beraktifitas 72 jam sejak perjalanan sampai 1 keberangkatan Pemerintah Arab Saudi); b) jemaah tidak dapat memenuhi keberagkatannya secara mandiri dengan syarat, beasiswa, beasiswa.

(2) **Protokol Kesehatan yang mencakup:** a) before di layanan kepada jemaah pelayanan kepada jemaah jemaah di dalam negeri melalui instansi Kementerian di pelayanan kepada jemaah jemaah di Arab Saudi melalui (diutamakan Pemerintah Arab Saudi); b) protokol kesehatan jemaah di dalam protokol kesehatan jemaah jemaah yang berlaku; c) PPKU bertanggung jawab atas jemaah jemaah di tanah air, jemaah dalam perjalanan; dan jemaah.

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
Minggu ke-4, 26 November 2021 (Minggu ke-4 s.d. 25 November 2021)

INVESTASI YANG MASIH TERHAMBAT RUWETNYA BIROKRASI

Sitiq Budi Sejati
Peneliti Perencanaan Politik Dalam Negeri
sitiq.budi@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Pesiden Jokowi kembali menyampaikan ketertanya terhadap kondisi di lapangan kepada aparat birokrasi dan birokrasi. Pertamina dan BUMN ingin melakukan investasi, mengalami proses birokrasi yang berbelit-belit dan berbelit-belit. Masalah birokrasi yang menghambat investasi menghambat proses investasi tersebut. Presiden Jokowi ingin melakukan investasi dengan profesionalisme dan disiplin birokrasi dan di

Pesiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tersebut agar tidak mengabaikan bahwa sebelumnya tidak efisien, proses birokrasi yang berbelit-belit yang dibataskan Pertamina dan BUMN harus dihilangkan seperti untuk tidak untuk BUMN dan BUMN premium serta LPG untuk Per perusahaan maka menjadi tidak profesional atau profesionalitasnya akan menjadi masalah untuk BUMN tersebut dapat melakukan investasi kepada mentori tidak ataupun kondisi di ini, terlebih jika politis yang membuat birokrasi.

FUNGSI DPR

Pengawasan Melalui fungsi pengawasan, Komisi II dan XI DPR RI dapat terus berkolaborasi pelayanan pelayanan masalah dan kinerja BUMN di dalam

ATENSI DPR RI

- Melihat Kementerian BUMN untuk dapat terus meningkatkan perbaikan kinerja BUMN dan terus meningkatkan birokrasi di dalam
- Melihat Ombudsman RI untuk dapat terus memantau dan mengawasi kinerja

SUMBER

Kompas.com, 20 November 2021.

BEFORE..

5 Artikel/Terbitan

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM
Minggu ke-4, 26 November 2021 (Minggu ke-4 s.d. 25 November 2021)

MENCEGAH MAJIF TANAH DENGAN PEMBAHARAN SISTEM OTENTIFIKASI LAHAN

Priyatno, Juru Hukum, S.H., LL.M.
Peneliti Madya/Hubungan Internasional
priyatno.hi@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Kelelahan pemerintah hukum yang melibatkan "mafia tanah" kembali mengancam pembangunan Indonesia. Dengan dana Rp1, seorang publik figur bernama Mirza Zubir beserta keluarganya mengaku telah menjadi korban mafia tanah karena pengalihan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian di perkiraan mencapai Rp17 miliar. Mirza Zubir menentang, harus yang dalam keluarga tersebut melanda pihak-pihak tertentu yang menaruh perhatian khusus kepada Mirza Zubir. Mirza Zubir menentang pengalihan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian di perkiraan mencapai Rp17 miliar.

Mirza mengancam mafia ARTnya tersebut di dalam tiga orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses pengalihan nama aset properti yang berada di kawasan Jakarta Timur. Mirza juga mengancam menyebarkan adanya mafia yang akan membuat pengalihan aset yang dilakukan oleh mantan AKU. Mirza mengancam untuk melaporkan mafia yang terlibat dalam proses pengalihan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Tuduhan Mirza yang dilaporkan keluarganya kepada pihak kepolisian. Mirza yang dilaporkan adalah Riri (chaerita selaku mantan ART, Edharan selaku suami ART, dan tiga orang pihak PPAT) akan nama Tandi, Ika Restiana, dan Edwin Ridwan.

Pembuatan akta menjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pendaftaran Tanah. Mirza juga mengancam untuk melaporkan mafia yang terlibat dalam proses pengalihan aset tersebut ke Polda Metro Jaya. Tuduhan Mirza yang dilaporkan keluarganya kepada pihak kepolisian. Mirza yang dilaporkan adalah Riri (chaerita selaku mantan ART, Edharan selaku suami ART, dan tiga orang pihak PPAT) akan nama Tandi, Ika Restiana, dan Edwin Ridwan.

FUNGSI DPR

DPR RI dalam hal ini Komisi II dan Komisi XI dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu terus mengawasi pemerintah untuk memastikan adanya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. DPR RI juga dapat melakukan pengawasan terhadap pejabat publik yang terlibat dalam proses pengalihan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian di perkiraan mencapai Rp17 miliar.

ATENSI DPR

- Kemisi II DPR RI yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI perlu melakukan pengawasan dengan cara mengawasi pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum terkait sengketa kepemilikan lahan, serta membuat aturan hukum yang jelas mengenai sistem sengketa tanah dan pertanahan lahan. Langkah ini merupakan upaya mencegah mafia tanah mengancam mafia tanah dengan melibatkan pengalihan aset lahan dan bangunan dengan total kerugian di perkiraan mencapai Rp17 miliar.
- Kemisi II DPR RI yang berkolaborasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu melakukan pengawasan dengan cara memastikan aparat Kepolisian untuk memastikan proses pengalihan hukum terkait kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknum mafia tanah.

SUMBER

metabiznes.com, 18 November 2021; republikonline.com, 24 November 2021.



KEHADIRAN PRESIDEN JOKO WIDODO PADA KTT G7 DAN MISI PERDAMAIAN INDONESIA DI UKRAINA

Sita Hidriyah
Peneliti Ahli Muda
sita.hidriyah@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Elmau, Jerman pada 28 Juni 2022. Kehadiran Presiden Jokowi tersebut sebagai salah satu pemimpin negara mitra G7 dan dalam kapasitasnya sebagai Presiden G20. Setelah mengikuti KTT G7, Jokowi melanjutkan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin.

KTT G7 yang dihadiri Amerika Serikat, Italia, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, serta beberapa negara mitra membahas upaya perdamaian masalah pangan global terkait krisis pangan. Krisis pangan sebagai perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak 24 Februari 2022, telah membuat dua negara yang sedang berperang tersebut merupakan p terbesar di dunia, termasuk kepada negara-negara miskin. Indonesia negara mitra G7 seperti India, Senegal, Argentina dan Afrika Selatan tamu undangan pada KTT G7 kali ini, ikut berperan dan berpendorong serta mengajak G7 mengupayakan perdamaian Rusia-Ukraina mencari solusi yang dialami banyak negara dunia dalam menghadapi k

Penyelenggaraan KTT G7 telah memicu ribuan orang turun ke jalan. Kelompok-kelompok demonstran yang kritis pada isu globalisasi terus menuntut penghapusan bahan bakar fosil, pelestarian keanekaragaman hayati, keadilan sosial serta upaya lebih besar untuk memerangi krisis iklim dan memberantas kemiskinan. Mengemukakan isu lingkungan terutang komitmen G7 untuk transisi energi, yaitu keluar dari semua bahan bakar fosil pada 2035. Selain itu, protes juga dilakukan untuk menuntut kesetaraan gender dan banyak sehingga dapat mengatasi berbagai krisis.

Setelah menghadiri KTT G7 di Jerman, Presiden Jokowi bertolak ke Ukraina untuk mewujudkan perdamaian dengan terhentinya perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy di Berlin, Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia terkait pentingnya penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit menyampaikan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, Jokowi semangat perdamaian tidak boleh luntur. Dengan membuka ruang dialog untuk melakukan gencatan senjata dalam upaya mengakhiri perang Ukraina dan Rusia dapat terwujud. Dalam pertemuan dengan Presiden Zelenskyy, Jokowi juga menyatakan pentingnya peran Ukraina dalam rantai pasok

Menurut Jokowi, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina dapat kembali melakukan ekspor bahan pangan. Peperangan Rusia-Ukraina telah menyebabkan ancaman krisis pangan global.

Selapas berkunjung ke Ukraina, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, dengan membawa misi yang sama, yakni membuka dialog untuk mengakhiri peperangan di Ukraina serta imbas dari peperangan tersebut terhadap keselamatan krisis pasokan pangan yang terjadi selama masa perang Rusia-Ukraina. Hal ini berkaitan erat dengan fakta bahwa Ukraina dan Rusia adalah negara-negara produsen gandum besar di dunia. Selain dampak krisis pangan yang terjadi akibat peperangan tersebut, dampak dengan adanya gelombang pengungsi yang terus bertambah di Ukraina juga perlu segera teratasi karena saat ini yang terpenting adalah mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan yang lebih besar apabila perang masih terus terjadi.

Atensi DPR

Kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, setelah menghadiri KTT G7, diharapkan dapat mendorong terwujudnya ruang dialog yang lebih terbuka dan intens antara Rusia dan Ukraina untuk mengakhiri peperangan. Sebagai bagian dari politik bebas aktif, kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia menunjukkan peran Indonesia yang ingin selalu berkontribusi dalam menjujukkan stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat global maupun regional. Oleh karena itu, konsistensi Indonesia sejak awal untuk terus menyuarakan segera diakhirinya perang di Ukraina melalui jalan dialog diintensifkan oleh Presiden Jokowi saat berkunjung ke Ukraina dan Rusia. DPR, melalui fungsi pengawasannya, dapat ikut mengawal dan memastikan bahwa upaya perdamaian di Ukraina ditempuh melalui jalan dialog dan perundingan, dan posisi Indonesia, sebagai negara yang berada di luar kawasan konflik, semata-mata berpihak untuk perdamaian dunia sekaligus mengakhiri tragedi kemanusiaan.

Sumber
cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022;
dw.com, 26 Juni 2022;
kemlu.go.id, 28 Juni 2022;
kompas.com, 27 Juni 2022;
kompas, 28 Juni 2022;
Republika, 30 Juni 2022.



EDITOR

Pelaksana: Sita Hidriyah, Rizki Nurfarida, Nurfarida P. Hantoro, David Sembelawati D., Sita Hidriyah, Nurfarida P. Hantoro, Ekkolubang: Sri Nurhayati D., Riyadi Santosa, Dian Cahyaningrum, Nisya Wiana Sanjaya, Alvinny T. Haulany, Karer: Adhmad Husabibin F., Yulia Indah, Rizki Nurfarida, Muhammad Faqih, Nur Shalikh F.R., Fatah Nurhalim, Layuter: David Sembelawati D., Sita Hidriyah, Nurfarida P. Hantoro, @publik_dpr, @publik_dpr_official, @publik_dpr2022



PENUNDAAN KEMBALI PENERAPAN PAJAK KARBON

Sri Nurhayati Qodriyatan
Peneliti Ahli Muda
sri.qodriyatan@pajak.go.id

Isu dan Permasalahan

Penerapan pajak karbon yang ditunda akan ditangguhkan kembali ditinjau. Keputusan ini diambil oleh Badan Kebijakan Fiskal yang disampaikan April 2022. Alasan penundaan karena pemerintahan Jokowi tengah menghadapi risiko global yang membayangi stabilitas ekonomi. Penundaan penerapan ini di tengah situasi yang seperti ini, mengingat Indonesia telah berkontribusi untuk memitigasi perubahan iklim yang sudah mencapai 29% dengan usaha sendiri dan 11% dengan bantuan internasional. Untuk menjadi kontributor tersebut, Indonesia membatalkan Rp1.967,31 triliun, dan pajak karbon menjadi salah satu sumber dana yang di manfaatkan untuk pengurangan emisi. Melalui Keputusan ini, pemerintah akan menunda kembali pajak karbon untuk membiayai pendanaan yang signifikan hingga 60%, baik dari anggaran APBN hingga 40% berasal dari pinjaman. Dana tersebut, termasuk dalam kebutuhan dari lahan Rp77,82 triliun, industri proses awal (Produksi Awal) untuk pertambangan, Rp40,54 triliun untuk sektor energi, Rp3,307,2 triliun.

Adapun semua pajak karbon yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

Tariff	<ul style="list-style-type: none">• Untuk sektor atas emisi karbon yang memberikan dampak lingkungan buruk• Untuk semua pajak dilakukan untuk pengurangan emisi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">• Mengurangi emisi karbon nasional• Peningkatan sumber daya alam• Meningkatkan daya saing industri• Meningkatkan lingkungan hidup
Suatu pajak	Orang pribadi atau lembaga yang membeli barang yang karbon dioksida, industri, dan aktivitas yang menghasilkan
Harga karbon	Rp100 per ton setara karbon dioksida ekuivalen
Peringkat target pajak	<ul style="list-style-type: none">• Tahun 2021 tidak ada pengapertaan pajak karbon• Tahun 2022 dan 2023 ditangguhkan sementara pajak karbon• Tahun 2024 dan seterusnya di mulai implementasi• Setelah berlaku semua pajak

Sumber: Kementerian Keuangan, 27 Juni 2022, dan dari Kementerian Keuangan, 27 Juni 2022

Penerapan pajak karbon Indonesia menggunakan skema cap and trade yang melibatkan pasar karbon. Ada dua mekanisme yang digunakan, yaitu perdagangan bebas emisi yang diperbolehkan untuk setiap industri serta membatalkan tarif pajak yang harus dibayarkan setiap satuan tonnya. Skema cap and trade ini digunakan di banyak negara. Mekanisme skema pajak karbon ini akan menimbulkan perbedaan alokasi industri antara lain, termasuk respons publik terhadap aturan tersebut.

Pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap yang akan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target *Wakafsky Gendered Contribution* Indonesia keadilan iklim, dan kembali ekonomi. Untuk setiap awal, pajak karbon akan diberikan pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada cap and trade. Mekanisme iklim yang akan mengatur mekanisme pasar karbon yang sudah berlangsung di negara PLTU, yang akan membatalkan emisi karbon dan menurunkan CO2.

Namun, berdasarkan penelitian *World Bank* dan *World Economic Forum*, bahwa jika Indonesia tidak menerapkan pajak karbon akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lambat, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi berdasarkan data yang diperoleh secara berkala dan menyesuaikan daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu ada kebijakan kebijakan lain untuk mengurangi dampak sosial dari penerapan pajak karbon.

Atensi DPR

Indonesia telah berkontribusi untuk mengurangi emisi, namun upaya untuk mengurangi emisi membutuhkan dana yang cukup besar. Pajak karbon menjadi salah satu sumber dana yang diharapkan untuk membiayai komitmen tersebut. Untuk itu, Komisi I DPR RI menengahkan pemerintah untuk segera menerapkan pajak karbon. Namun, penerapan pajak karbon harus disertai dengan kebijakan-kebijakan lain untuk menjaga dampak sosial yang timbul, seperti kebijakan pengurangan tarif pajak, kenaikan subsidi, bebas pengalihan pajak ke sektor pajak, juga bantuan sosial lainnya yang sudah ada.

Dana dari pajak karbon dapat digunakan sebagai sumber pendanaan baru nasional untuk modal pembangunan atau untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas Covid-19 untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim sesuai untuk investasi dalam energi terbarukan dengan modal pemangku listrik tenaga angin, hidro, panas bumi, tenaga surya, biomass, bioenergi serta untuk proyek-proyek rehabilitasi lahan kritis serta lainnya.

Sumber

Berita Indonesia, 29 Juni 2022;
kompas.com, 27 Juni 2022;
Mata Indonesia, 29 Juni 2022;
mediaindonesia.com, 30 Juni 2022;
Neraca, 28 Juni 2022.



EDITOR

Pelaksana: Sita Hidriyah, Rizki Nurfarida, Nurfarida P. Hantoro, David Sembelawati D., Sita Hidriyah, Nurfarida P. Hantoro, Ekkolubang: Sri Nurhayati D., Riyadi Santosa, Dian Cahyaningrum, Nisya Wiana Sanjaya, Alvinny T. Haulany, Karer: Adhmad Husabibin F., Yulia Indah, Rizki Nurfarida, Muhammad Faqih, Nur Shalikh F.R., Fatah Nurhalim, Layuter: David Sembelawati D., Sita Hidriyah, Nurfarida P. Hantoro, @publik_dpr, @publik_dpr_official, @publik_dpr2022



11 Artikel/terbitan

UJI COBA DAN DISEMINASI

Penyebarluasan melalui Sekretariat AKD dan website Pulit (dalam bentuk PDF)
Upload di Medsos (dalam bentuk MP3)

Februari s.d. Juli 2022 :
15 terbitan x 11 Komisi
Total: 165 Artikel



Instagram:
@puslitbkdoofficial



Instagram:
@puslitbkdoofficial



puslitbkdoofficial



942

Posts

362

Followers

25

Following

Pusat Penelitian BKD

Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR
RI

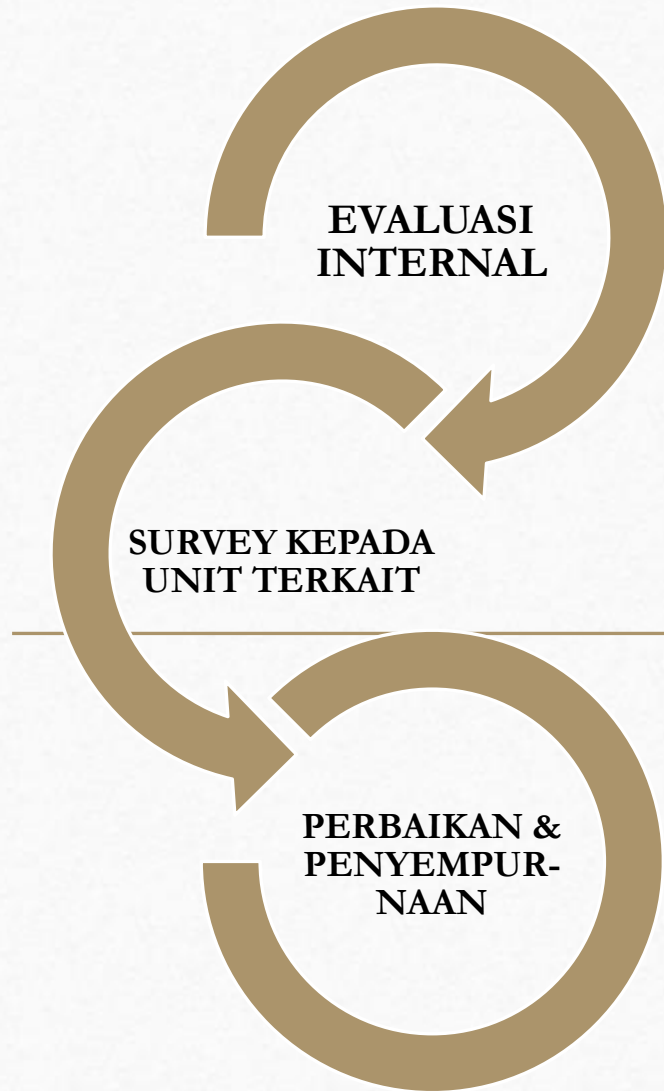
Twitter: @PuslitBK_DPRRI

See translation
puslit.dpr.go.id/

Silakan:

Follow, like dan Comment

RENCANA KERJA BERIKUTNYA



Terima Kasih